

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA  
 INVESTOR DAILY  
 KOMPAS  
 KORAN TEMPO  
 MEDIA INDONESIA  
 PIKIRAN RAKYAT  
 RAKYAT MERDEKA  
 REPUBLIKA  
 SUARA KARYA

SEPUTAR INDONESIA  
 SUARA PEMBARUAN  
 SINAR HARAPAN  
 TABLOID KONTAN  
 THE JAKARTA POST  
 MAJALAH GATRA  
 MAJALAH TEMPO  
 MAJALAH TRUST

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 70

TAHUN 2006

## Tuntutan 'Ringan' buat Newmont

Walaupun berkesimpulan ada pelanggaran tindak pidana, jaksa memberi tuntutan "ringan" kepada PT Newmont Minahasa Raya. Tapi, perusahaan asal Amerika Serikat itu tetap merasa tidak bersalah.

Ariyanto dan Dedi Setiawan

**MEMBONGKAR** terjadinya dugaan tindak pidana lingkungan yang dilakukan oleh korporasi tidaklah semudah yang dibayangkan. Buktinya, Jumat dua pekan lalu, di Pengadilan Negeri Manado, tim jaksa hanya mampu menyodorkan tuntutan denda Rp 1 miliar terhadap PT Newmont Minahasa Raya dan penjara tiga tahun, serta denda Rp 500 juta bagi presiden direktur perusahaan asal Amerika Serikat tersebut.

Padahal, menurut jaksa, perusahaan yang melakukan penambangan emas itu terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pencemaran lingkungan di Teluk Buyat, Minahasa Selatan, Sulawesi Utara. "Terdakwa telah membuang limbah ke lingkungan," tutur jaksa penuntut umum, Purwantha, di muka majelis hakim.

Seperti yang diketahui, pada Agustus tahun lalu, PT Newmont Minahasa Raya dan presiden direktornya, Richard Bruce Ness, didudukkan sebagai terdakwa. Di hadapan majelis hakim yang diketuai Ridwan Damanik, tim jaksa memaparkan bahwa antara bulan Oktober 1997 sampai 2004 di Desa Ratatotok Selatan, Kecamatan Ratatotok, Kabupaten Minahasa, PT Newmont Minahasa Raya melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Jaksa menunjuk berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri Nomor Lab: 4171/KTF/2004 tanggal 27 September 2004. Di sana disebutkan bahwa kadar polutan dalam sampel air laut Teluk Buyat telah melebihi ambang batas baku mutu. Sampel biota laut dari teluk tersebut terkontaminasi logam berat merkuri (Hg) dan arsen (As).

Berdasarkan data tersebut, jaksa menjerat terdakwa dengan Pasal 41 ayat (1) jo. Pasal 45, Pasal 46 ayat (1), dan Pasal 47 Undang-Undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU No. 23 Tahun 1997). Beleid itu menyebutkan bahwa barang siapa yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 500 juta.

Sementara, Pasal 46 ayat (1) undang-undang tersebut menyebutkan, jika tindak pidana dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, maka dilakukan tuntutan pidana dan sanksi pidana serta tindakan tata tertib dijatuhkan, baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain tersebut maupun terhadap mereka yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.

Agaknya, setelah membeberkan sederetan saksi dan bukti dalam persidangan yang cukup panjang, jaksa tetap yakin dengan dakwaannya. Dalam berkas tuntutan setebal 217 halaman, jaksa berkesimpulan bahwa Richard Bruce Ness telah membiar-

kan pembuangan limbah merkuri dan arsen selama perusahaan beroperasi sejak Maret 1996 sampai Oktober 2004. Dalam kurun waktu itu, perusahaan tersebut telah memuntahkan limbah sebanyak 33 ton merkuri dan 17 ton limbah yang dibuang ke udara dalam bentuk gas.

Padahal, PT Newmont Minahasa Raya tidak memiliki izin pembuangan *tailing* alias limbah dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). Benar bahwa sudah ada surat Menteri Lingkungan Hidup No. B-1456/Bapedal/07/2000. Namun, menurut jaksa, adanya surat tersebut tidak berarti telah ada persetujuan atas studi ERA (*Ecological Risk Assessment*) PT Newmont Minahasa Raya.

Untuk lebih menguatkan tuntutan itu, jaksa juga menunjuk barang bukti berupa 10 helai rambut milik saksi Herson Bawole (warga Buyat yang diduga menjadi korban penyakit akibat pencemaran) dan satu ekor ikan yang dalam tubuhnya terdapat kandungan logam yang melebihi ambang batas.

Uniknya, seperti yang disebutkan di atas, saat menyampaikan tuntutan, jaksa hanya menyebut angka tiga tahun penjara atau kurang dari separuh hukuman maksimal yang ditetapkan undang-undang. Tapi, jaksa bukannya tak punya alasan. Di muka persidangan, jaksa menyatakan bahwa terdakwa belum pernah dihukum, sehingga diberikan ancaman pidana hanya tiga tahun penjara dipotong masa tahanan plus denda Rp 500 juta.

Walaupun mendapat tuntutan "ringan", PT Newmont Minahasa Raya dan Richard Bruce Ness tetap membantah keras tuduhan yang dilayangkan oleh jaksa. "Kami sangat terkejut dan tidak habis pikir terhadap tuntutan jaksa yang tidak berdasarkan pada kaidah dan logika hukum yang benar," tutur Luhut M.P. Pangaribuan, kuasa hukum para terdakwa. Menurut Luhut, jaksa telah mengabaikan kesaksian lebih dari 30 orang saksi dan ahli yang telah menyatakan bahwa Teluk Buyat tidak tercemar dan tidak ada dampak negatif dari operasi tambang PT Newmont Minahasa Raya. Selain itu, jaksa juga gagal membuktikan setiap tuduhan yang diajukan dalam dakwaannya. "Bukti yang diajukan di pengadilan secara meyakinkan mendukung posisi kami," tandas Luhut.

#### ONGKOSNYA BISA JAUH LEBIH BESAR

Sementara, Richard Bruce Ness dalam siaran persnya mengungkapkan bahwa rekomendasi yang diajukan oleh jaksa merupakan pelecehan atas sistem hukum negara mana pun. Tuduhan yang tidak berdasar tersebut sekaligus menjadi hambatan bagi pemerintah yang sedang berusaha menarik kembali investasi ke Indonesia.

Bagi Ness yang sudah tinggal di Indonesia selama 30 tahun dan mengaku sudah mengadopsi banyak cara hidup di negeri ini, tuntutan tadi merupakan suatu penghinaan serius dan menimbulkan kekecewaan bagi seluruh rakyat yang merindukan terbentuknya masyarakat di bawah panji-panji hukum. "Ini merupakan kebohongan yang serius," katanya.

Sementara itu, di mata Indro Sugianto, Direktur ICEL (Indonesia Center for Environmental Law), berdasarkan saksi dan bukti yang dihadirkan di persidangan, jaksa yang menggunakan jerat tindak pidana korporasi justru telah berhasil membuktikan dakwaannya. Lebih dari itu, menurut Indro, penegakan hukum pidana seharusnya memberi efek jera bagi pelaku pencemar lingkungan. "Efek jera itu bukan hanya pada besarnya tuntutan. Jika yang terkena adalah pelaku usaha tertentu, maka hal itu juga bisa menjadi peringatan buat yang lainnya," tutur direktur lembaga swadaya masyarakat yang aktif mengadvokasi kasus yang terkait dengan lingkungan itu.

Sampai saat ini, sebenarnya sudah ada beberapa kasus kerusakan lingkungan yang pelakunya dijerat dengan menggunakan tindak pidana korporasi. Misalnya kasus pembakaran hutan dan lahan di Bangkinan (Riau) dan peledakan amonia di Gresik (Jawa Timur). Kedua pelaku kasus tersebut dinyatakan bersalah dan dianjar hukuman oleh majelis hakim.

Sejatinya, kata Indro, jika seorang pengusaha mampu mengelola industrinya sehingga tidak mencemari lingkungan, maka hal itu lebih menguntungkan. Sebaliknya, bila pengusaha tak memedulikan dampak lingkungan dari usahanya, maka suatu saat nanti ongkos yang harus dikeluarkan bisa jauh lebih besar. "Logika semacam ini yang selama ini tak dipahami oleh kalangan pengusaha," paparnya. □

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA  
 INVESTOR DAILY  
 KOMPAS  
 KORAN TEMPO  
 MEDIA INDONESIA  
 PIKIRAN RAKYAT  
 RAKYAT MERDEKA  
 REPUBLIKA  
 SUARA KARYA

SEPUTAR INDONESIA  
 SUARA PEMBARUAN  
 SINAR HARAPAN  
 TABLOID KONTAN  
 THE JAKARTA POST  
 MAJALAH GATRA  
 MAJALAH TEMPO  
 MAJALAH TRUST

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 18

TAHUN 2006

# Sebuah Perlawanan Bernama Freehold

Penjualan Lapindo tidak melanggar aturan Bapepam. Itu kalau pembelinya benar-benar perusahaan yang tidak terafiliasi dengan Grup Bakrie. Ada yang mengusulkan, pemegang saham minoritas sebaiknya mendapat jaminan yang tertuang dalam sebuah perjanjian.

Budi Kusumah dan Pringgo Sanyoto

**HAWA** panas dari semburan lumpur Lapindo Brantas kini telah menjalar ke bursa efek. Badan Pengawas Pasar Modal, suka atau tidak suka, akhirnya harus mau menerima sebuah kenyataan bahwa Lapindo Brantas telah berpindah tangan dari PT Energi Mega Persada Tbk. kepada Freehold Group Limited. Nama yang disebut terakhir tadi adalah sebuah badan usaha yang bermar-

kas di British Virgin Island—yang salah satu keahliannya adalah membeli perusahaan-perusahaan yang kinerjanya sudah jatuh untuk "direnovasi" kemudian dijual kembali.

Sayang, hingga berita ini diturunkan, belum jelas benar pada harga berapa Lapindo dijual. Yang pasti, langkah ini telah membuat Bapepam seperti kebakaran jenggot. Bagaimana ti-

dak? Sejak Grup Bakrie—yang menjadi pemilik saham mayoritas (70%) di Energi—berniat melepaskan Lapindo ke pihak ketiga, Bapepam terus-menerus aktif melakukan pencegahan. Sampai-sampai, dua permohonan yang dilayangkan pihak Energi—untuk menggelar rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB)—selalu ditolak mentah-mentah. Alasannya, selain terjadi benturan kepentingan, aksi korporasi itu juga diduga akan membuat lepasnya tanggung jawab pemilik lama Lapindo atas musibah yang diakibatkan oleh menyemburnya lumpur panas dari sumur Banjar Panji-1 di Sidoarjo.

Seperti diketahui, semula, Lapindo akan dipindahtangankan kepada Bakrie Oil and Gas dengan harga US\$ 2. Namun karena pembelinya merupakan perusahaan yang terafiliasi dengan Grup Bakrie, Bapepam tidak memberikan izin. Bahkan, belakangan, Fuad Rahmany (Ketua Bapepam-LK) melarang per-

Energi Mega Persada. Mereka menuntut agar Energi bersikap transparan dan menerangkan tentang siapa sebenarnya Freehold, sang pembeli itu. "Harus jelas, siapa pembeli Lapindo, kemampuannya apa, struktur perusahaannya bagaimana, serta siapa pemegang saham pengendalinya," kata Fuad.

Sampai di sini, kecuali soal transparansi, belum jelas benar apa sebenarnya yang diinginkan pihak Bapepam. Sebab, jika transaksi yang dilakukan Energi dan Freehold benar-benar tidak melanggar aturan main, mestinya tak ada lagi masalah yang perlu diperdebatkan. Apalagi, Wakil Presiden Jusuf Kalla telah menegaskan bahwa sesuai Keppres Nomor 13 Tahun 2006, yang bertanggung jawab atas terjadinya bencana lumpur itu tetap PT Lapindo. "Siapa pun pemiliknya," kata Wapres, se usai salat Jumat, pekan lalu.

### PEMERINTAH JUGA BERSTATUS OPERATOR

Pihak Bakrie sendiri sebenarnya tidak lepas tangan begitu saja—kendati kepemilikannya di Lapindo sudah menjadi nol persen. Sebelumnya, tanpa persetujuan pemegang saham PT Energi Mega Persada, Kelompok Bakrie telah memberikan pinjaman kepada Lapindo sebesar US\$ 30 juta. Kini, walaupun kepemilikan Energi sudah tak ada lagi, Bakrie masih akan memberikan bantuan berupa pinjaman dengan bunga ringan.

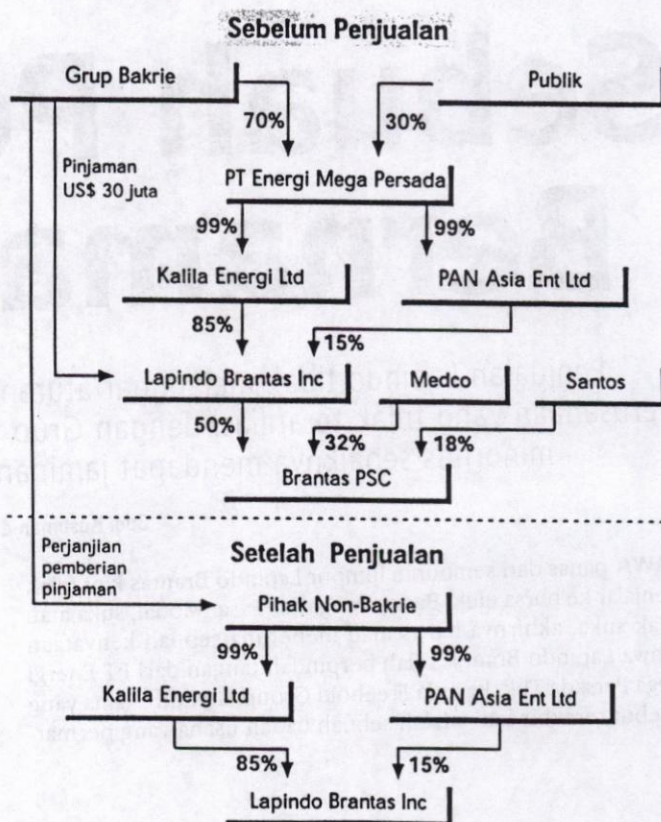
Bantuan itu, kata seorang petinggi di Grup Bakrie, tertuang dalam sebuah perjanjian yang diteken bersama Freehold, beberapa waktu lalu. Hitung-hitungannya begini: total dana yang dibutuhkan untuk penanggulangan lumpur diperkirakan mencapai US\$ 140-US\$ 170 juta. Ini di luar biaya *resettlement* yang diperkirakan berkisar antara Rp 1 triliun-Rp 2 triliun). Nah, jika

usaha itu dijual kepada siapa pun sebelum semua permasalahan "terang benderang".

Mungkin itu sebabnya manajemen Energi Mega Persada mengambil "langkah berani". Pada 14 November, seluruh saham mereka di PT Kalila Energi Ltd. dan Pan Asia Ent Ltd. (dua perusahaan yang menguasai 50% saham Lapindo) langsung dijual kepada Freehold Group. Tentu bukan tanpa alasan kalau Energi bertindak nekat seperti itu. Dalam surat yang ditujukan kepada Bapepam dan Bursa Efek Jakarta disebutkan bahwa penjualan itu terpaksa dilakukan sesegera mungkin demi "mendahulukan kepentingan pemegang saham minoritas dan kepentingan *going concern Energy*".

Dan yang tak kalah pentingnya, berdasarkan Peraturan Bapepam No. IX.E.1 dan No. IX.E.2, transaksi itu tidak mengandung unsur benturan kepentingan dan bukan suatu transaksi material. Sehingga, penjualan tersebut tidak memerlukan persetujuan pemegang saham minoritas maupun mayoritas yang biasanya diperoleh dari RUPSLB.

Entah apa yang akan dilakukan Bapepam maupun pengelola Bursa Efek Jakarta dalam menghadapi kenyataan ini. Namun, kelihatannya, otoritas pasar modal tersebut belum menyerah begitu saja. Dalam sebuah kesempatan di Jimbaran-Bali, Kamis pekan lalu (16/11), Ketua Bapepam Fuad Rahmany menyatakan bakal meneliti laporan yang disampaikan oleh manajemen



angka itu yang dipakai, maka sebagai pemegang 50% saham, kewajiban Energi adalah sebesar US\$ 70 juta-US\$ 85 juta. Tapi, karena sebelumnya telah menyetor US\$ 30 juta, maka sisa beban yang masih harus ditanggung Energi adalah US\$ 40-US\$ 55 juta.

Lantas sisanya? Di sini pun muncul persoalan baru. Jika disesuaikan dengan penguasaan saham, maka 32% dari total biaya tadi mestinya ditanggung oleh Medco E & P Brantas dan 18% sisanya oleh Santos Brantas. Namun, pihak Medco bersikeras untuk tidak ikut menanggung beban yang menjadi bagianya sebesar US\$ 14 juta. Alasannya, dalam sebuah perjanjian yang dibuat pada tahun 1992 disebutkan bahwa anak perusahaan PT Medco Energi Internasional Tbk. itu tidak termasuk pihak yang bertanggung jawab bila terjadi musibah pada ladang gas tersebut.

Medco tampaknya *ngotot* dan akan mempersoalkan hal ini melalui proses arbitrase. Tapi, itu bukan harga mati. Buktinya, belakangan tersebar berita bahwa Medco siap bernegosiasi ihwal besarnya kewajiban yang mesti dia tanggung. Artinya, jelas, arbitrase bukan satu-satunya jalan. Apalagi, Kepala BP Migas, Kardaya Warnika, telah menegaskan bahwa yang bertanggung jawab dalam kasus ini—sesuai kontrak *production sharing*—adalah Energi, Medco, dan Santos.

Hanya mereka bertiga? Sebenarnya tidak. Menurut seorang praktisi hukum, kalau benar-benar mengacu pada kontrak, maka pemerintah juga mestinya ikut bertanggung jawab. Sebab, dalam kontrak disebutkan bahwa pemerintah juga berstatus sebagai operator.

#### AGAR ENERGI TAK RUGI BESAR

Tapi, terlepas dari siapa saja yang akan bertanggung jawab atas bencana tersebut, pada intinya, langkah yang dilakukan Bakrie sudah mencakup kepentingan seluruh korban—tak terkecuali investor minoritas, yang selama ini selalu berdebar-debar lantaran harga saham yang dimilikinya terus merosot. Sebagai bukti, lihat saja harga saham Energi Mega Persada. Sejak diguyur lumpur panas, harga saham berkode ENRG itu terus menu-

kik. Jika sebelum musibah ENRG diperdagangkan pada harga Rp 850-Rp 900, kini telah merosot ke level Rp 510 (17/11).

Itu berarti, dalam waktu kurang dari enam bulan, harga saham yang satu ini mengalami penurunan sekitar 70%. Itu sebabnya para pelaku di pasar modal menilai langkah pelepasan Lapindo akan mendatangkan sentimen positif terhadap PT Energi Mega Persada. Bahkan, ada yang menduga, setelah "upacara" penjualan itu tidak dirongrong lagi oleh berbagai permasalahan, ada kemungkinan harga ENRG akan kembali ke level normal (di atas Rp 800). "Jadi, bersabarlah. Kalau Anda memegang banyak ENRG, jangan buru-buru melakukan *cut loss*," kata seorang analis dari sebuah perusahaan sekuritas.

Apalagi, kinerja Energi tidak jelek-jelek amat. Pada semester I yang baru lalu, misalnya, emiten ini masih bisa menanggung laba bersih Rp 177 miliar atau naik Rp 7 miliar dibanding periode yang sama di tahun sebelumnya. "Secara fundamental, perusahaan ini cukup bagus," tuturnya.

Pendapat senada dikemukakan Edwin Sinaga. Menurut analis dari Kuo Kapital Raharja itu, dengan penjualan Lapindo—secara kasatmata—pemegang saham minoritas diuntungkan. Itu karena Energi Mega terbebas dari beban kerugian yang lebih besar.

Namun, Edwin menyarankan agar pemegang saham tidak merasa waswas, sebaiknya Energi membuat sebuah perjanjian yang isinya menjamin tidak akan terjadi kerugian berikutnya yang diakibatkan oleh bencana lumpur tersebut.

Sebuah usulan yang bagus, memang. Tapi, biar bagaimanapun, perjanjian semacam itu merupakan sesuatu yang tidak lazim. Apalagi, lumpur yang menjadi penyebab itu, sampai hari ini, masih terus mengalir. Dan penanggulangannya kerap tersendat karena berbagai faktor. Sementara itu, musim penghujan sudah di depan mata, sehingga kalau pembuangan lumpur tidak berlangsung cepat, maka bencana banjir akan mengancam.

Benar-benar mengerikan, memang. Banjir lumpur saja sudah memakan korban sebegitu banyak. Apalagi kalau ditambah dengan banjir akibat air hujan. Wah!

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

<input type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> INVESTOR DAILY <input type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input checked="" type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA <input type="checkbox"/> SUARA KARYA		<input type="checkbox"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> TABLOID KONTAN <input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH TRUST <input type="checkbox"/>									
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS		<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI		<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input checked="" type="checkbox"/> UMUM							
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12				13 14 15	16 17 18	19	20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31				
HALAMAN : 3											TAHUN 2006

■ JAY ABDULLAH ALATAS, DIREKTUR MINARAK LABUAN CO LTD

Soal Tanggung Jawab Penanganan Lumpur Pasca Perpindahan Kepemilikan Lapindo Brantas Inc

# Karena Punya Banyak Ladang Kalau Tidak, Mana Freehold Mau

TERKAIT perpindahan kepemilikan Lapindo Brantas Inc, yang bertanggung jawab atas kasus lumpur Sidoarjo, Wakil Presiden Jusuf Kalla menepis kekhawatiran bahwa Lapindo Brantas Inc akan lepas tanggung jawab. Wapres selaku pemerintah, menjamin Lapindo tetap pada komitmennya terhadap penanganan kasus semburan lumpur yang belum bisa dihentikan itu.

"Siapa pun pemiliknya, tetap harus bertanggung jawab. Keppresnya (Keppres No.13/2006 tentang Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur di Sidoarjo) sudah menyebutkan Lapindo bertanggung jawab penuh," tegas Kalla usai salat Jumat (17/11) di Kantor Wakil Presiden.

Sementara itu, Minarak Labuan Co Ltd, dari kelompok usaha Bakrie, menyatakan bersedia mendukung pendanaan bagi Freehold Group Limited, pemilik baru Lapindo, dalam menanggulangi persoalan lumpur Lapindo itu. Menurut informasi, Minarak Labuan adalah perusahaan investasi yang didirikan atas hukum Labuan, Malaysia, sejak 1998. Per 30 Juni 2000, perusahaan ini sempat menguasai 4,27 miliar lembar saham PT Bumi Resources Tbk.

Mengenai kesediaan menanggung pendanaan Freehold, Direktur Minarak Labuan Jay

Abdullah Alatas mengatakan dukungan itu diberikan berdasarkan Keppres No.13/2006. Selengkapnya, berikut petikan wawancara dengan Jay Abdullah Alatas, Jumat (17/11)

*Kepemilikan Lapindo telah dialihkan ke Freehold. Bakal melepaskan tanggung jawab terhadap korban lumpur?*

Tidak. Kami sebagai perwakilan dari Bakrie akan tetap menyediakan seluruh dana penanganan lumpur Lapindo.

*Berapa besar dananya?*

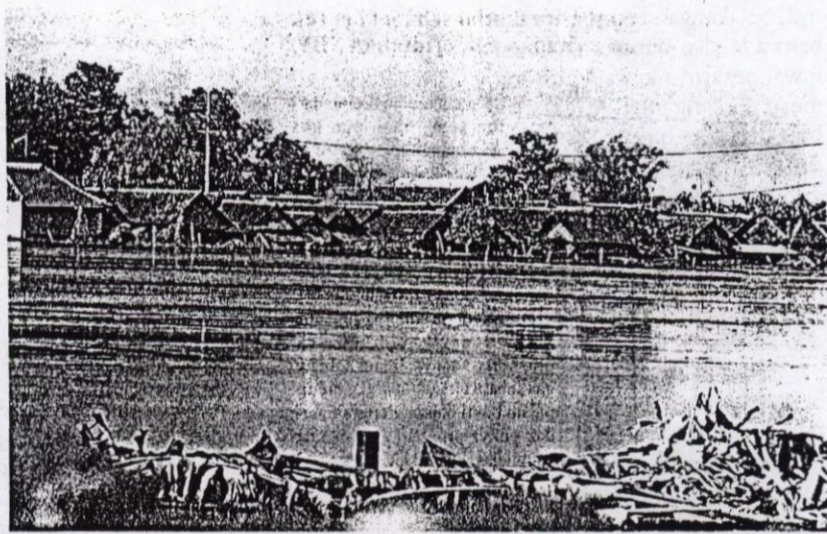
Pokoknya, berapa pun yang ditetapkan nantinya, kami akan membantu Freehold.

*Bisa dijelaskan penyediaan dana tersebut?*

Dengan memberikan pinjaman dana untuk penanganan lumpur itu kepada Freehold. Itu sebagai konsekuensi Lapindo dialihkan ke Freehold. Minarak Labuan mewakili kelompok Bakrie berkomitmen menjamin ketersediaan dana yang diperlukan oleh Lapindo. Itu untuk kewajibannya dalam penanganan lumpur yang sesuai Keppres No 13.

*Bagaimana komitmen tersebut bisa dihasilkan?*

Ya tentunya kesepakatan untuk tetap membantu Lapindo tersebut setelah berunding dengan pihak Freehold.



Tanggung jawab rumah-rumah yang terendam ini kepada siapa?

*Tanggapan dan respon Freehold waktu itu seperti apa?*

Pihak Freehold sendiri yang memberikan jaminan tentang pemberian pinjaman tersebut. Kata mereka waktu saham itu dijual, "Gimana dong, ini kan ada masalah sosial. Lalu dijawab, "Oke, kita tetap bantu masalah sosial itu. Termasuk komitmen Keppres 13 juga kita bantu."

*Apa sih alasan Minarak mau bantu membiayai?*

Itu kan persoalan pembiayaan saja. Toh dalam pinjaman nanti, akan dikembalikan. Keinginan

kita itu hanya untuk jangan sampai dibilang melepaskan tanggung jawab. Kita coba tunjukkan ke semua pihak bahwa kita punya kewajiban moral.

*Sudah sampai mana proses penyiapan dana pinjaman itu?*

Saat ini kami tengah membuat jadwal untuk pengucuran besaran dananya. Yang pasti, berapa pun dana yang dibutuhkan akan dikuçurkan. Tapi perlu dijelaskan juga, bahwa pinjaman kepada Freehold ini tidak dimasukkan dalam perjanjian SPA (sales and purchase agre-

ement) atau jual beli. Tidak ada itu dalam SPA.

*Sejauh mana Anda kenal Freehold?*

Perusahaan itu adalah perusahaan investasi turn around. Kalau diilustrasikan itu dia beli Lapindo lalu dibagusin kerjanya untuk kemudian dijual lagi.

*Mengapa Freehold tertarik sama Lapindo?*

Ya kan karena Lapindo punya banyak ladang. Maka dia bisa lihat upside-nya. Ya kalau tidak begitu, mana mau mereka. ■ GO

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

<input type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> INVESTOR DAILY <input type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA <input type="checkbox"/> SUARA KARYA	<input type="checkbox"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> TABLOID KONTAN <input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input checked="" type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH TRUST <input type="checkbox"/>																													
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input checked="" type="checkbox"/> UMUM																												
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
HALAMAN: 113											TAHUN 2006																			

### Lapindo Dijual ke Perusahaan Non-Bakrie

PT Energi Mega Persada Tbk. akhirnya menjual PT Lapindo Brantas kepada Freehold Group Ltd., Selasa pekan lalu, tanpa persetujuan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam). Perusahaan investasi yang berbasis di British Virgin Island ini pun

tak punya kaitan sama sekali dengan kelompok usaha maupun keluarga Bakrie.

Padahal, sebelumnya perusahaan pengelola ladang gas di Sidoarjo, Jawa Timur, itu hendak dijual ke Lyte Ltd. (afiliasi Grup Bakrie) seharga US\$ 2 (sekitar Rp 18 ribu). Dengan begitu, diharapkan keluarga Bakrie akan tetap memikul tanggung jawab atas semua kerugian akibat bencana lumpur panas di lokasi pengeboran, kendati Lapindo tak lagi bernaung di bawah Energi Mega.

Rencana penjualan ke Lyte, Oktober lalu, terganjal setelah Bapepam menolak penyelenggaraan rapat umum pemegang saham Energi Mega untuk menyetujui aksi korporasi itu. Alasannya, belum keluar hasil penilaian tim independen mengenai siapa nanti yang akan bertanggung jawab atas bencana itu. "Tak ada bukti kuat bahwa Lyte terafiliasi Grup

Bakrie," kata sumber *Tempo*. Karena itu, dikhawatirkan nantinya Bakrie tak bisa diminta terus menanggung kerugian yang diderita.

Juru bicara Energi Mega, Herwin Hidayat, mengatakan penjualan itu tak butuh persetujuan Bapepam karena tidak termasuk transaksi material (10 persen dari total pendapatan atau 20 persen dari total ekuitas perusahaan). Meski begitu, Ketua Bapepam, Fuad Rahmany, menyatakan akan meminta klarifikasi dari manajemen Energi Mega. "Siapa *ultimate shareholder*-nya, apakah benar non-afiliasi Bakrie," katanya pekan lalu.

64

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> INVESTOR DAILY <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA <input type="radio"/> SUARA KARYA		<input type="radio"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> TABLOID KONTAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input checked="" type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH TRUST <input type="radio"/>																												
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS		<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI		<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input checked="" type="checkbox"/> UMUM																										
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
HALAMAN : 88											TAHUN 2006																			

# Tawaran dari Sang Kamerad

Pakar Rusia menawarkan teknologi baru untuk mengatasi lumpur Lapindo. Apakah ini sebuah solusi alternatif?

**K**INI giliran pakar dari Rusia bermaksud menaklukkan lumpur Lapindo. Lazimnya, Indonesia sering mendengarkan saran dari pakar AS dan Eropa Barat, tapi kini sudah waktunya—seperti yang dikatakan Irzal Chaniago, Presiden Teknologi Adiguna Rusia-Indonesia (Astari)—Indonesia menjenguk "the other side of the moon". Maksudnya adalah "menjenguk Rusia".

Untuk mempromosikan "sisi lain permukaan bulan" itulah, kelompok Astari membawa dua pakar Rusia yang mengaku sanggup menghentikan semburan lumpur di Sidoarjo. Sebulan silam, kelompok Astari mendatangkan Pavel V. Korol. Ahli pengeboran minyak ini mengusulkan gabungan teknologi selubung payung dan tekanan besar. Pavel, yang hadir ke Indonesia bersama Duta Besar Indonesia untuk Rusia, Susanto Pudjomartono, telah bertemu dua menteri, Purnomo Yusgiantoro dan Rachmat Witoelar

Susanto mengakui kedatangan Pavel atas inisiatifnya. Namun, menurut Irzal, kedua kamerad itu masuk tim yang sama. "Pavel jago membunuh semburan, sementara Pavlov ahli mendeteksi bawah permukaan," katanya di kantornya, kompleks perumahan Pertamina, Kuningan, Jakarta Selatan. Keduanya memang tidak hadir bersamaan di Indonesia, karena memiliki kesibukan yang berbeda.

Sedangkan pada Senin pekan lalu, Irzal menghadirkan Mikhail Pavlov Viktorovich dalam diskusi di kantor Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) di Jakarta. Pavlov, yang menjadi pembicara utama, menawarkan teknologi MSM dan *stratum well field* (SWF). Adapun teknologi *micro-seismic monitoring* (MSM) dikembangkan Institut Teknologi Informasi Rusia.

Pavlov menjelaskan, untuk menghentikan semburan lumpur, harus diketahui terlebih dulu lapisan di bawah permukaan Porong, misalnya dari lapisan

mana lumpur itu keluar, berapa volume dan bagaimana arahnya. "Jika pangkal penyebabnya diketahui, upaya penghentian semburan dapat dilakukan dengan cepat," katanya.

Menurut Pavlov, gabungan teknologi SWF dan MSM mampu mengetahui secara lebih jelas kondisi di bawah permukaan bumi. Pada SWF, pengolahan data dilakukan dengan menggabungkan sekitar 350 parameter seismisitas, gravitasi, kemagnetan, dan keruangan. Hasil dari penggabungan data akan muncul dalam citra tiga dimensi. "Ini yang membedakan dengan teknologi yang ada," ujar Pavlov.

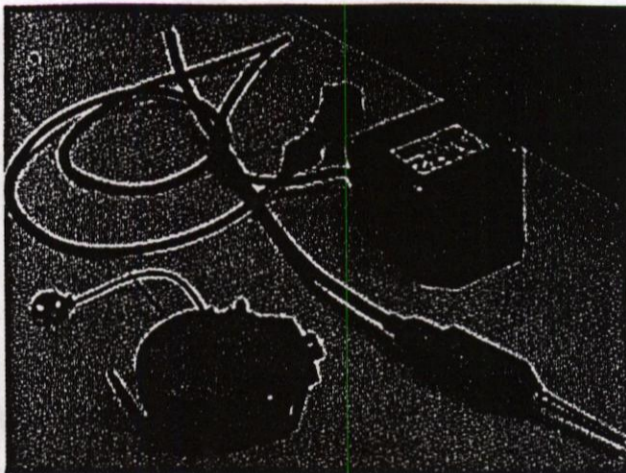
Adapun MSM merupakan teknik survei di lapangan yang menggunakan alat sensor yang ditanam di kedalaman tertentu. Semakin dalam dan lebar area yang akan dipantau, jumlah alatnya semakin banyak. Alat ini mampu menyampaikan sinyal yang menunjukkan posisi dan aliran material yang ada dalam permukaan bumi.

Jika kedua teknologi itu diterapkan di Sidoarjo, SWF bakal memetakan struktur geologi. Sementara itu, dengan MSM, bakal dideteksi sumber lapisan yang

bocor serta arah aliran air dan lumpur dari bawah ke atas permukaan. "Kombinasi keduanya mampu merekonstruksi model geologi di lapisan gunung lumpur dalam perut bumi," kata pakar dari Institut Teknologi Informasi Rusia ini. Dia mengklaim, tingkat akurasi teknologi ini untuk mengidentifikasi obyek tergolong tinggi, yakni hingga 95 persen.

Apakah yang ditawarkan Pavlov merupakan teknologi baru? Tidak. Agung Budi Darmoyo, ahli geologi dari Lapindo Brantas Inc., menjelaskan bahwa Halliburton menggunakan MSM ketika memetakan lapisan bawah tanah Porong. Perusahaan dari Amerika Serikat ini disewa Lapindo untuk menghentikan semburan lumpur yang sejak 29 Mei belum juga berhenti. "Memang ada *noise* dan tidak bisa memetakan secara jelas," kata Agung.

Ketua Program Studi Geofisika ITB, Darharta Dahrin, mengaku telah menggunakan teknologi MSM sejak 10 tahun lalu. "Yang baru dari Pavlov adalah menggabungkan semua metode, mulai dari seismisitas sampai kemagnetan," kata Darharta, yang memperoleh gelar doktor geofisika dari Universitas Paris



VII. Selain itu, ujarnya, peralatan yang dimiliki Pavlov sangat lengkap.

Darharta, yang hadir dalam diskusi di BPPT, menilai Pavlov masih tertutup dalam menjelaskan metode itu. Padahal, katanya, untuk aplikasi satu teknologi, kita harus mengetahui landasan teoretis dan uji coba pemakaiannya, sehingga dapat diketahui kelebihan dan kekurangannya. "Sayangnya, Pavlov tidak menerangkan itu semua," ujarnya.

Yusuf Surachman, Direktur Pusat Pengkajian dan Penerapan Teknologi Inventarisasi Sumber Daya Alam BPPT, juga berpendapat senada. "Kami harus mengetahui terlebih dulu sejauh mana yang ditawarkan Pavlov diterima dunia industri," katanya. Namun dia mengakui kecenderungan ilmuwan Rusia untuk berhati-hati.

Pavlov memang berjanji bakal mengungkap lebih jauh jika ada kesepakatan dengan pihak terkait untuk menerapkannya di Sidoarjo. Pernyataan semacam ini mirip dengan yang disampaikan Pavel V. Korol ketika menjawab keraguan sejumlah pihak tentang teknologi payung yang ditawarkan.

Memang, di kalangan ahli pengeboran, teknologi selubung payung dengan menggunakan polimer sudah jamak dipakai. Mereka menggunakan polimer untuk menahan aliran air sehingga tidak masuk ke lubang sumur ketika diambil minyaknya.

Yang lain dari Pavel adalah menyemprotkan polimer dengan pompa bertekanan raksasa

yang mampu melawan tekanan semburan lumpur. Sementara Pavlov tidak bersedia menyebut dana yang dibutuhkan untuk timnya, sebaliknya dengan Pavel, yang telah meninjau Sidoarjo bersama istrinya.

Menurut Pavel, biaya keseluruhan untuk menghentikan aliran lumpur mencapai US\$ 50 juta. "Saya mengajukan proposal ini. *No cure no pay* (kalau tidak selesai masalahnya, tidak perlu bayar)," katanya. Dari

tawaran itu, 90 persen risiko ditanggung Pavel dan harus dibayar jika lumpur berhenti menyembur.

Namun Pavel meminta 10 persen atau US\$ 5 juta sebagai uang muka. Dana ini untuk mendatangkan peralatan dan tenaga ahli. Sayangnya, dia tidak memberikan proposal terperinci, sehingga sampai saat ini tim nasional penanggulangan lumpur Sidoarjo dan Lapindo Brantas belum memberikan keputusan.

"Kami khawatir proposalnya diambil namun orangnya tidak dipakai," kata Arys Djuanda, Wakil Presiden Astari.

Untung Widyanto

65

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

<input type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> INVESTOR DAILY <input type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA <input type="checkbox"/> SUARA KARYA		<input type="checkbox"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> TABLOID KONTAN <input checked="" type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH TRUST <input type="checkbox"/>																												
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS		<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI		<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input checked="" type="checkbox"/> UMUM																										
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
HALAMAN: 16											TAHUN 2006																			

# Gold prices run out of steam after hitting new record, oil tumbles

Damien Steffan  
and Pierre Pratabuy  
Agence-France Presse/London

Most commodity markets retreated last week, with oil and base metals suffering heavy losses, while wool prices bucked the trend to equal a recent two-year peak on soaring Chinese demand.

New York crude slid to its lowest level since June 2005 on unseasonably mild U.S. weather and persistent concerns that the market was oversupplied.

**Gold:** Gold prices ran out of steam after hitting a two-month high the previous week.

"A steep decline in oil prices coupled with a slightly firmer dollar ... have weighed on sentiment, pushing prices below US\$620 per ounce," said Barclays Capital metals analyst Sudakshina Unnikrishnan.

"With ... the Thanksgiving holiday looming this week gold is well placed to continue drifting along within recent ranges."

A stronger dollar makes commodities priced in the U.S. unit on world markets less attractive to buyers using other currencies.

On the London Bullion Market, gold prices fell to \$620.50 per ounce at Friday's late fixing, from \$629.30 one week earlier.

**Silver:** Silver retreated but remained near \$13 per ounce.

"Dips in silver continue to find good support with speculators and investors still keen to enter the market," said James Moore, an analyst for specialist website TheBullionDesk.com.

On the London Bullion Market, silver prices sank to \$12.75 per ounce at Friday's fixing, from \$13.03 the previous week.

**Base Metals:** The base metals corrected sharply downwards following a record-breaking three-week run.

In Friday trading on the London Metal Exchange (LME), copper prices retreated as low as \$6,650 per ton — the lowest level since June 23.

On Friday, three-month copper prices fell to \$6,690 per ton on the LME from \$7,120 the previous week.

Three-month aluminum prices sank to \$2,615 per ton from \$2,773.

Three-month nickel prices slid to \$29,395 per ton from \$30,950.

Three-month lead prices tumbled to \$1,494 per ton from \$1,715.

Three-month zinc prices decreased to \$4,080 per ton from \$4,404.50.

Three-month tin prices dropped to \$9,700 per ton, up from \$10,050 a week earlier.

**Oil:** The price of New York crude sank beneath \$55 per barrel, striking a level last

seen in June 2005 amid concerns over the full implementation of the recent cut in OPEC oil output.

New York crude plunged Friday to \$54.86 per barrel, marking the lowest point since June 14, 2005, before Hurricane Katrina had devastated U.S. Gulf Coast energy facilities and sent crude futures to then-record levels.

London's Brent crude meanwhile plunged as low as \$57.85, last seen Nov. 18, 2005.

The U.S. contract had plunged \$2.50 Thursday as traders reviewed conflicting reports on exports from the Organization of Petroleum Exporting Countries. Analysts added that New York prices were lower owing to the contract's expiry on Friday.

Traders also focused on a combination of mild autumn weather and ample U.S. winter fuel supplies.

**Rubber:** Rubber prices dipped to 2006 lows owing to little rain in major producing Asian nations.

"Rain is sporadic and the raw material is coming in," said Rashid Ahmed, an analyst at Corrie Maccoll.

The rainy season, which began in October and draws to a close in late November, normally makes it harder for farmers to collect latex.

On TOCOM, Tokyo's commodity exchange, natural rub-

ber for March delivery drooped to 196.80 yen per kilogram on Friday, from 216.60 yen a week earlier.

Singapore's RSS 3 March contract sank to 163.50 U.S. cents per kilogram on Friday, from 176.25 U.S. cents a week earlier.

**Cocoa:** Cocoa prices headed lower.

"New York cocoa futures fell heavily on speculative selling, following a weaker London" market, said Davies.

On the LIFFE, London's futures exchange, the price of cocoa for December delivery retreated to 826 pounds per ton on Friday, from 868 pounds a week earlier.

On the New York Board of Trade (NYBOT), the December contract fell to \$1,460 per ton on Friday, from \$1,566 a week earlier.

**Coffee:** Coffee prices slipped lower after reaching the highest level for seven and a half years in London the previous week.

"Many market participants view coffee in both London and New York as overpriced," noted Davies.

On LIFFE, Robusta quality for January delivery declined to 1,488 dollars per ton on Friday, from \$1,615 a week earlier.

On NYBOT, Arabica for December delivery decreased to 112.50 cents per pound on Friday, from 118.30 U.S. cents.

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA  
 INVESTOR DAILY  
 KOMPAS  
 KORAN TEMPO  
 MEDIA INDONESIA  
 PIKIRAN RAKYAT  
 RAKYAT MERDEKA  
 REPUBLIKA  
 SUARA KARYA

SEPUTAR INDONESIA  
 SUARA PEMBARUAN  
 SINAR HARAPAN  
 TABLOID KONTAN  
 THE JAKARTA POST  
 MAJALAH GATRA  
 MAJALAH TEMPO  
 MAJALAH TRUST

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : VII

TAHUN 2006

## Kadin Tangkis Tudingan Amrik Pengadilan Newmont Nggak Fair

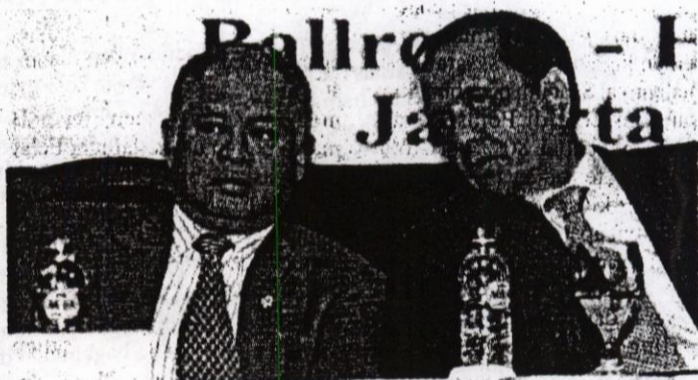
Jakarta, RM

Tudingan pengusaha Amerika Serikat (AS) bahwa pengadilan soal kasus Newmont di Indonesia tidak *fair*, ditolak mentah-mentah oleh pengusaha Indonesia yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin). Bahkan Kadin Indonesia pun menantang untuk melakukan uji publik terhadap pandangan tersebut.

"Dalam pertemuan dengan Kadin AS kemarin, mereka menyampaikan soal pengadilan kita yang buruk. Tentu saja saya menentang mereka, karena tudingan tersebut tak beralasan. Toh masih banyak pengadilan Indonesia yang mengeluarkan keputusan yang adil," tegas Ketua Umum Kadin Indonesia MS Hidayat di Jakarta, marini.

Hal ini disampaikan Hidayat terkait tudingan pengusaha dari negerinya Presiden George Bush bahwa pengadilan kasus Newmont yang dinilai tidak adil dan merugikan perusahaan asal "Negeri Paman Sam" itu.

Hidayat mengakui, memang masih banyak kendala di bidang hukum, transparansi dan kea-



MS Hidayat (kanan) bersama Menteri ESDM Purnomo Yusglantoro.

manan yang menjadi pertimbangan mengapa pengusaha AS masih belum banyak yang berinvestasi di Indonesia. Dalam lima tahun terakhir, baru sekitar 1,3 miliar dolar AS saja investasi AS yang masuk.

Namun, lanjut Hidayat, dirinya tak bisa menerima tudingan bahwa pengadilan di Indonesia tidak transparan. Menurutnya, pengadilan kasus Newmont dilakukan melalui suatu proses pengadilan yang terbuka dan bisa diuji, apakah *fair* atau tidak.

"Sebenarnya kan yang mengajari kita mengenai kesadaran

lingkungan baik di Newmont ataupun di Freeport kan AS. Harusnya mereka dukung dong, saat kita terapkan kebijakan tegas tersebut kepada kedua perusahaan itu," cetusnya.

Bahkan, Hidayat mengaku menantang pengusaha AS untuk melakukan uji publik terhadap pengadilan kasus Newmont. "Tolong jangan intervensi dan menghentikan proses pengadilan (kasus Newmont-red). Ini pelajaran untuk kita semua. Karena memang akan menjadi penghambat masuknya investasi besar ke Indonesia," tandasnya. ■ IU

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> INVESTOR DAILY <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input checked="" type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA <input type="radio"/> SUARA KARYA	<input type="radio"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> TABLOID KONTAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH TRUST <input type="radio"/>																													
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input checked="" type="checkbox"/> UMUM																												
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
HALAMAN : 17											TAHUN 2006																			

LUMPUR SIDOARJO

## Lapindo Diminta Terbuka soal Penjualan Saham

**SIDOARJO (Media):** Bupati Sidoarjo Wien Hendrarso meminta PT Lapindo Brantas Inc terbuka kepada warga korban lumpur panas tentang penjualan saham Lapindo kepada PT Freehold Ltd.

"Lapindo harus menjelaskan secara konkret kepada masyarakat agar dapat memahami secara benar serta tidak menimbulkan multitafsir yang belum tentu kebenarannya soal penjualan saham itu," kata Wien kepada wartawan di Sidoarjo, kemarin.

Menurut Bupati, saat ini dirinya belum mendapatkan informasi secara faktual dari General Manager PT Lapindo Brantas Imam P Agustino ataupun dari PT Energi Mega Persada tentang penjualan saham Lapindo.

Dia berharap agar pihak Lapindo memberikan penjelasan secara lebih terbuka kepada warga tentang bagaimana dan apa tujuan penjualan saham tersebut.

Wien juga mengaku, saat ini terus berupaya menghubungi Lapindo agar sesegera mungkin melakukan upaya komunikasi melalui media massa guna menjelaskan persoalan secara lebih konkret.

"Yang paling penting sekarang, yakni bagaimana rasa tanggung jawab Lapindo terhadap bencana luapan lumpur. Hal ini sangat penting karena 70% permasalahan lumpur merupakan permasalahan bidang sosial dan ini masalah terberat yang harus segera diselesaikan," katanya. Apalagi, kata Wien, dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 13/2006 tentang Pembentukan Tim Nasional Penanggulangan Musibah Lumpur Sidoarjo telah disebutkan dengan jelas bahwa kasus luapan lumpur ini merupakan tanggung jawab Lapindo. "Jadi, nanti pertanggungjawabannya seperti apa, semuanya harus jelas," tegasnya.

Sementara itu, hingga kemarin siang akses jalan Tol Gempol-Porong masih ditutup untuk semua kendaraan meski secara umum jalan tol sudah aman dari genangan lumpur setelah jebolnya tanggul di Kilometer (Km) 38, Sabtu (18/11).

Penutupan jalan tol tersebut karena tim nasional penanggulangan banjir lumpur tidak ingin mengambil risiko terjadinya *overtopping* atau luberan lumpur dari tanggul utama yang bisa menyelamatkan jiwa pengguna jalan.

Petugas tim nasional juga terus berupaya keras menutup bekas tanggul yang jebol di Km 38 dengan menggerakkan peralatan berat serta puluhan truk pengangkut pasir dan batu ke lokasi tanggul jebol.

Patahan tanggul selebar 30 meter masih terlihat menganga disertai lumpur panas yang mengalir deras ke arah danau penampungan atau *pond V* di Desa Pajarakan, Kecamatan Porong. Menurut juru bicara Tim Nasional Rudi Novianto, jalan tol akan dibuka lagi setelah tim nasional memastikan tanggul yang jebol sudah tertanggulangi secara sempurna tidak ada lagi retakan atau lubang. (FL/HS/N-3)

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

<input type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> INVESTOR DAILY <input type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input checked="" type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA <input type="checkbox"/> SUARA KARYA	<input type="checkbox"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> TABLOID KONTAN <input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH TRUST <input type="checkbox"/>																													
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input checked="" type="checkbox"/> UMUM																												
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
HALAMAN: 6											TAHUN 2006																			

**LUMPUR LAPINDO**

**Tanggul Jebol Tol Porong-Gempol Kembali Ditutup**

**SIDOARJO (Media):** Tanggul utama penahan lumpur panas di Sidoarjo kembali jebol. Akibatnya lumpur meluber ke jalan tol pada Kilometer 38 sehingga menyebabkan Tol Porong-Gempol kembali ditutup.

Jebolnya tanggul ini terjadi kemarin dini hari. Tanggul tidak mampu lagi menahan tekanan semburan lumpur panas yang volume semburannya terus bertambah. Lumpur kemudian mengalir menuju kolam penampungan dua dan selanjutnya meluber ke jalan tol. Lumpur sempat menggenangi jalan tol setinggi 30 cm dan sepanjang 200 meter.

"Melubernya lumpur ini karena menguatnya semburan sehingga tanggul yang dibuat tidak bisa menahan lagi," kata Koordinator Ferdaco Sutrisno selaku penanggung jawab keamanan di sekitar lokasi semburan.

Hingga kemarin siang Timnas Penanggulangan Lumpur Panas masih berusaha menutup tanggul utama yang jebol. Petugas juga terus meninggikan tanggul di kolam penampungan dua di sisi jalan tol.

Selama November, tiga kali Tol Porong-Gempol ditutup. Penutupan itu menimbulkan kemacetan luar biasa di jalan raya Porong hingga mencapai lebih dari 5 kilometer.

Pada bagian lain, Timnas Penanggulangan Lumpur Panas juga masih terus mempercepat pemasangan lima pipa untuk *spill way* (tempat penyaluran pembuangan air hujan) baru.

Dari lima pipa yang dipasang, tiga unit berada di rumah pompa berdampingan dengan lima pipa lama, sedangkan dua lagi dipasang di dua sisi kanal yang dipergunakan untuk mengalirkan lumpur. Penambahan lima mesin baru itu bertujuan mengantisipasi banjir atau tanggul jebol saat musim hujan.

Sementara itu, Bupati Sidoarjo Win Hendrarso meminta penjualan saham Lapindo Brantas Inc kepada PT Freehold Inc oleh PT Energi Mega Persada (EMP) dilakukan secara transparan. "Seharusnya masyarakat juga diberi penjelasan kenapa atau apa tujuan dari penjualan saham itu," kata Win.

Menurut Win, penjelasan itu diperlukan agar tidak menimbulkan keresahan pada masyarakat terutama yang menjadi korban. Alasannya, hal itu terkait dengan pertanggungjawaban ganti rugi korban lumpur. (HS/FL/N-2)

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

<input type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input checked="" type="checkbox"/> INVESTOR DAILY <input type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA <input type="checkbox"/> SUARA KARYA			<input type="checkbox"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> TABLOID KONTAN <input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH TRUST <input type="checkbox"/>																											
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS		<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI		<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input checked="" type="checkbox"/> UMUM																										
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
HALAMAN : 14											TAHUN 2006																			

# Penghentian Direksi Bukit Asam Berpotensi Melanggar GCG

JAKARTA – Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menilai Kementerian BUMN telah memberikan contoh buruk dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance/GCG*) terkait pembentukan *caretaker* direksi PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk.

Selain IAI, Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) dan Masyarakat Profesional Madani (MPM) memberikan pernyataan yang sama terkait dengan kebijakan yang diputuskan dalam rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) BUMN tambang itu.

Ketua IAI Kompartemen Akuntan Manajemen Ali Darwin menjelaskan, tindakan melowongkan seluruh dewan direksi Bukit Asam dan menugaskan komisaris melaksanakan pekerjaan direksi merupakan contoh buruk penerapan GCG.

"Padahal kami berniat meningkatkan pelaksanaan GCG di Indonesia pada tahun 2009. Tetapi, dengan pengelolaan BUMN seperti ini maka niat itu akan sulit terealisasi," ujarnya kepada pers di Jakarta, Minggu (19/11).

RUPSLB Bukit Asam pada 15 November 2006 memutuskan

penghentian dengan hormat seluruh direksi perseroan dan memberikan tugas sementara kepada komisaris menjalankan operasional rutin hingga ditetapkannya direksi baru paling lambat 60 hari.

Komisaris juga bisa menunjuk *caretaker* guna menjalankan aktivitas perseroan hingga terpilihnya dewan direksi baru melalui RUPSLB mendatang.

Jajaran direksi Bukit Asam yang diberhentikan dengan hormat adalah Dirut Ismet Harmanini.

Selain itu, empat direksi yang diberhentikan adalah Ismet Harmanini, Arwady Cornelius Purba, Sukrisno, Abdul Aziz Nazori, dan Mahbub Iskandar.

Menurut Ali Darwin, dari sisi kepatutan hukum, penyerahan operasional perseroan kepada komisaris tidak melanggar hukum. Tapi, berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik keputusan tersebut sudah melanggar kaidah GCG.

Pihaknya menilai sebaiknya Kementerian BUMN merekomendasikan penundaan RUPSLB sampai ada calon pengganti direksi atau tidak menghentikan seluruh direksi pada waktu bersamaan.

## Turunkan Kinerja

Menurut dia, Bukit Asam merupakan perusahaan terbuka yang sebagian sahamnya dimiliki investor publik sehingga keputusan pe-

nyerahan operasional perusahaan kepada komisaris berpotensi merugikan investor publik. Pasalnya, komisaris kurang memahami pelaksanaan operasional perusahaan sehingga kinerja perusahaan bisa tersendat dan penerapan tidak efisien.

Pada kesempatan sama, Sekretaris Jenderal MPM Andi Bahtiar Sirang mengungkapkan, dalam Undang Undang Perseoran Terbatas penunjukan *caretaker* tidak diatur. Alasannya, *caretaker* praktis tidak berfungsi dan tidak bisa beroperasi layaknya direksi meskipun tim yang menduduki *caretaker* berasal dari direksi lama.

"Ke depan diharapkan Kementerian BUMN menetapkan calon direksi baru sebelum RUPSLB digelar sehingga hal yang sama tidak terulang," ujarnya.

Sebelumnya, Sekretaris Meneg BUMN M Said Didu menje-

**"Dari sisi kepatutan hukum, penyerahan operasional perseroan kepada komisaris tidak melanggar hukum. Tapi, berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik keputusan tersebut sudah melanggar kaidah GCG"**

■ Ali Darwin, Ketua IAI Kompartemen Akuntan Manajemen

laskan, sesuai dengan peraturan, komisaris akan ditunjuk menjalankan perseroan hingga ditetapkan direksi baru. Karena, *fit and proper test* calon direksi baru belum selesai.

"Kini direksi perseroan kosong karena masa jabatan sudah habis. Namun demikian, komisaris bisa saja menunjuk direksi yang lama untuk menjalankan perseroan hingga direksi baru terpilih," ujarnya. (hut)

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input checked="" type="radio"/> INVESTOR DAILY <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA <input type="radio"/> SUARA KARYA	<input type="radio"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> TABLOID KONTAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH TRUST <input type="radio"/>																													
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input checked="" type="checkbox"/> UMUM																												
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
HALAMAN : 13											TAHUN 2006																			

TERKAIT PENJUALAN LAPINDO

# Bapepam Wajib Cermati Unsur Material

JAKARTA – Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) diminta men-  
cermati unsur material dalam transaksi penjualan  
(*spin off*) Lapindo Brantas Inc oleh PT Energi  
Mega Persada Tbk kepada Freehold Group.

Ketua Umum Masyarakat Inves-  
tor Sekuritas Indonesia (Misi) ND  
Murdani mengatakan, pihaknya  
mendukung penuh langkah-  
langkah yang ditempuh otoritas  
pasar modal dalam menelusuri  
asal-usul Freehold, termasuk data  
yang berkaitan penjualan Lapindo.  
"Penilaian material atas pen-  
jualan Lapindo harus dilihat dari  
sisi nilai investasi Energi kepada  
Lapindo sebelum kasus lumpur  
panas di Sidoharjo terjadi, bukan  
hanya berdasarkan harga jual  
saat ini," ujar dia kepada *Investor Daily* di Jakarta, akhir pekan  
lalu.

Dia menegaskan, divestasi  
Energi bisa dikategorikan sebagai  
transaksi material, kalau mengacu  
kepada nilai investasi Energi di  
Lapindo sebelumnya. Oleh karena  
itu, Bapepam-LK harus menilai  
kembali transaksi tersebut.

Sementara itu, Kepala Biro Pe-  
meriksaan dan Penyidikan Ba-  
pepam-LK Wahyu Hidayat meng-  
atakan, dia belum mendapat tug-  
as untuk memeriksa divestasi La-

pindo. "Saya tidak bisa berko-  
mentar, sebab belum ada perintah  
dari Pak Fuad Rahmany (Ketua  
Bapepam-LK, red). Sebaiknya  
Anda bertanya ke Pak Ketua," kata  
dia kepada *Investor Daily*.

Pada 14 November 2006, Ener-  
gi menandatangani jual-beli Lapin-  
do kepada Freehold, perusahaan  
yang tidak terafiliasi dengan Bak-  
rie Group. Energi melepas 100%  
sahamnya ke Freehold, menyusul  
batalnya penjualan kepada Lyte  
Ltd senilai US\$ 2. Lyte masih  
terafiliasi dengan Bakrie Group.

Sebelumnya Wapres Jusuf Kal-  
la menegaskan, Lapindo tetap ha-  
rus bertanggung jawab atas mu-  
sibah lumpur panas kendati sudah  
menjual sahamnya kepada Free-  
hold.

Direktur Minarak Labuan Ltd Jay  
Adullah Alatas akhir pekan lalu  
menegaskan, pihaknya tetap ber-  
komitmen dalam penanganan  
luapan lumpur, meskipun Kalila  
Energy Ltd dan Pan Asia Enterprise  
Ltd telah dialihkan ke Freehold.

Energi belum lama ini memper-

kirakan, biaya penanganan bencana  
lumpur bisa mencapai US\$ 180 juta.

Murdani berpendapat, nilai  
transaksi Lapindo terkesan meng-  
ada-ada. Sebab, perusahaan ha-  
nya ingin menyelamatkan diri dari  
bertambahnya kerugian atau yang  
mengarah kepada kebangkrutan.

"Harga jual Lapindo sebesar  
US\$ 2 terlalu murah. Hal itu ha-  
nya menguntungkan pembeli dan  
dikemudian hari bisa dijual kem-  
bali dengan harga lebih mahal,"  
tandas dia.

Lebih lanjut dia mengatakan,  
penjualan aset perusahaan publik  
tidak boleh dirahasiakan emiten.

## Aksi Spekulasi

Sementara itu, pengamat pasar  
modal Goei Siau Hong mengata-  
kan, mengenai transaksi material  
atau tidak material hanya dilihat  
dari satu sisi. Esensi kasus ini ha-  
rus menjadi perhatian utama se-  
mua pihak, seperti siapa yang ha-  
rus bertanggung jawab atas keru-  
gian. Sebab, penjualan Lapindo  
merupakan upaya untuk keluar  
dari tanggung jawab.

"Kita tidak mengetahui Free-  
hold itu mempunyai uang atau ti-  
dak. Bagaimana kalau tidak me-  
miliki uang," ujar dia.

Dia menilai, transaksi Lapindo  
sangat murah dan hanya menyis-  
ahkan sebuah spekulasi menge-  
nai Lapindo di masa mendatang.

(rad/kp)

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- 

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 72

TAHUN 2006

## Arpeni siapkan belanja modal sebesar US\$50 juta

Oleh M. MUNIR HAIKAL  
*Bisnis Indonesia*

JAKARTA: PT Arpeni Prata-ma Ocean Line Tbk menyiapkan belanja modal sebesar US\$50 juta pada tahun depan untuk membeli dua unit kapal *dry bulk* jenis panamax, membeli satu buah *floating crane* dan dua buah kapal tunda.

Direktur Keuangan Arpeni Ateng Suhendra mengatakan sumber dana untuk pendanaan belanja modal tersebut berasal dari kas internal perusahaan.

"Kebijakan belanja modal kami tempuh secara konservatif setelah adanya kepastian kontrak penggunaan kapal dalam jangka panjang. Ketika kami memperoleh kontrak pengangkutan dalam jangka panjang, Arpeni akan menyewa kapal untuk sementara waktu dan selanjutnya membeli kapal," ujarnya akhir pekan lalu.

Dia menjelaskan pembelian kapal memerlukan waktu sekitar dua tahun sehingga siap dipergunakan oleh perseroan. Pada triwulan III ini, perseroan telah membeli satu unit ka-

pal *dry bulk* jenis Panamax dengan kapasitas 69.120 bobot mati (*death weight ton/dwt*), enam unit kapal tunda dan delapan unit kapal tongkang.

Hingga akhir 2005, jumlah kapal yang dimiliki oleh perseroan mencapai 43 unit kapal dengan total kapasitas mencapai 556.630 dwt.

Per triwulan III tahun ini, rasio utang terhadap modal (*debt to equity ratio/DER*) perseroan telah mencapai 1,41 kali. Menurut Ateng, perseroan berupaya menjaga supaya rasio DER di bawah dua kali.

Sementara itu, Direktur Arpeni Ronald Nangoi pada kesempatan yang terpisah mengatakan perseroan berencana melakukan pemecahan nilai nominal saham (*stock split*) untuk menambah likuiditas saham yang beredar di pasar.

Perseroan memecah nilai nominal saham yang semula nilai nominalnya sebesar Rp500 per lembar menjadi Rp250 per lembar (satu saham lama mendapatkan dua saham baru).

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> INVESTOR DAILY <input checked="" type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA <input type="radio"/> SUARA KARYA		<input type="radio"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> TABLOID KONTAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH TRUST <input type="radio"/>																												
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS		<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI		<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input checked="" type="checkbox"/> UMUM																										
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
HALAMAN : 2											TAHUN 2006																			

LUMPUR PANAS

Tol Porong Ditutup Lagi akibat Luberan Lumpur

SIDOARJO, KOMPAS — Tol ruas Porong-Gempol di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, kembali ditutup total sejak Sabtu (18/11) pukul 03.45. Ini disebabkan lumpur panas yang menjebol tanggul di sekitar semburan akhirnya meluber ke badan jalan. Dengan demikian, tercatat sedikitnya empat kali lumpur meluber ke jalan tol yang merupakan akses utama Surabaya-Pasuruan/Malang itu.

Berdasarkan pemantauan, lumpur meluber di sekitar kilometer 38,500. Lumpur menggenangi badan jalan sepanjang sekitar 100 meter. Ketinggian lumpur sekitar 30 sentimeter.

Mulai Sabtu pagi, sejumlah alat berat dikerahkan untuk meninggikan tanggul sisi selatan tol dan menutup lubang tanggul ring 1. Adapun genangan lumpur di badan jalan dibersihkan dengan cara dicampur tanah. Selanjutnya, lumpur itu disingkirkan ke tepi jalan menggunakan bulldoser.

Menurut Supervisor Pembangunan Tanggul Lapindo Brantas Inc (LBI) Riyadi, awalnya pada Jumat sekitar pukul 22.00, lumpur meluber dari dalam tanggul ring 1. Tanggul itu berbentuk setengah lingkaran tepat di sekitar semburan. Fungsinya untuk mengarahkan laju lumpur agar tidak ke tol. Tergerus terus-me-

nerus, tanggul ring 1 akhirnya jebol selebar sekitar 10 meter. Melalui lubang ini, lumpur pertama-tama mengalir deras ke kolam penampungan. Sekitar pukul 03.00, lumpur meluber ke tol.

Akibatnya, Jasa Marga akhirnya menutup ruas Porong-Gempol mulai pukul 03.45. Sebelumnya, ruas ini hanya dibuka untuk satu arah, yakni khusus kendaraan dari Surabaya tujuan Pasuruan/Malang.

Jalan Raya Porong yang merupakan akses Surabaya-Malang/Pasuruan selain tol ruas Porong-Gempol, seperti kejadian sebelumnya, selalu menjadi jalur pengalihan. Akibatnya, terjadi ke-

macetan di jalan tersebut. Pada pantauan pukul 11.30, kemacetan mencapai sekitar tiga kilometer.

Kepala Cabang Tol Surabaya-Gempol Subakti Syukur, mengatakan, belum tahu kapan tol akan dibuka lagi. "Untuk pembukaan tol, saya menunggu instruksi Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur di Sidoarjo," katanya.

Secara terpisah, Ketua Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur di Sidoarjo Basuki Hadimuljono, menyatakan akan mengupayakan penguatan tanggul secepatnya. Targetnya, Minggu pagi ini, tol sudah bisa dibuka lagi untuk satu arah. (LAS)

73

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA  
 INVESTOR DAILY  
 KOMPAS  
 KORAN TEMPO  
 MEDIA INDONESIA  
 PIKIRAN RAKYAT  
 RAKYAT MERDEKA  
 REPUBLIKA  
 SUARA KARYA

SEPUTAR INDONESIA  
 SUARA PEMBARUAN  
 SINAR HARAPAN  
 TABLOID KONTAN  
 THE JAKARTA POST  
 MAJALAH GATRA  
 MAJALAH TEMPO  
 MAJALAH TRUST

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 3

TAHUN 2006

# Bapepam Abaikan Investor Bukit Asam

**JAKARTA (Media):** Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dinilai tidak melindungi pemegang saham publik. Pasalnya, lembaga itu semakin tidak tegas dan menggunakan standar ganda dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi di pasar modal Indonesia.

Penilaian itu disampaikan pengamat pasar modal dari Sigma Research Institute Jasso Winarto, Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Manajemen (IAI-KAM), Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI), dan Masyarakat Profesional Madani (M-PM) menanggapi persoalan yang terjadi di tubuh PT Tambang Batu Bara Bukit Asam Tbk (BA).

Dalam kasus PT BA, menurut Jasso, Bapepam terlihat tidak berupaya melindungi pemegang saham publik dan lebih berpihak kepada pemerintah sebagai pemegang saham mayoritas.

Padahal PT BA merupakan perusahaan publik, sehingga kepentingan pemegang saham publik harus diutamakan. "Bapepam sangat tidak bijaksana dan seharusnya menggunakan peraturan dalam pasar modal untuk memperingatkan pemerintah," katanya di Jakarta, kemarin.

Kosongnya kursi direksi Bukit Asam, menurut Jasso, jelas-jelas merugikan pemegang saham minoritas. Pasalnya, dengan kosongnya kursi direksi, manajemen perusahaan akan sulit dilakukan. Dengan demikian, ekspektasi investor terhadap PT BA akan meleset.

"Di sini investor publik sebagai pemegang saham minoritas dirugikan karena tidak memiliki informasi yang cukup untuk mengetahui apa yang terjadi di perusahaan,"

tambah Sekjen MPM Andi Bahtiar Sirang.

Langkah pemerintah yang menunjuk komisaris untuk menjalankan fungsi direksi juga dinilai sebagai langkah yang menyalahi tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance/GCG*).

"Ini bisa berdampak serius bagi perusahaan. Sebab untuk urusan rutin saja komisaris belum tentu bi-



**Jasso Winarto**

sa menjalankan, apalagi bila harus menghadapi keputusan penting, misalnya tanda tangan kontrak bisnis. Tentu akan ditunda dulu sampai direksi baru terpilih," kata Ketua IAI-KAM Ali Darwin.

Bursa Efek Jakarta (BEJ) diketahui telah memanggil Komisaris Utama PT BA Jasman untuk memperoleh pemaparan kondisi yang terjadi di PTBA, Jumat (17/11). BEJ juga menganggap bahwa langkah penunjukan komisaris menjadi pelaksana tugas direksi juga tidak patut.

"Undang-undang Perseroan Terbatas juga tidak mengenal adanya

karteker direksi. Kita bisa ditawarkan orang yang paham GCG," tegas Ali.

Kementerian BUMN diharapkan menjadikan hal yang terjadi sebagai pembelajaran. Sebab bila terus berulang akan mencoreng citra pasar modal Indonesia yang harus terus dijaga untuk menarik investasi agar dapat memacu pertumbuhan ekonomi.

#### Agenda tersembunyi

Selain mengkritik lambannya Bapepam, Jasso juga menduga ada agenda tersembunyi di balik pengosongan kursi direksi Bukit Asam. Pasalnya, pemerintah hingga kini belum memberikan alasan yang jelas di balik keputusan tersebut.

Apalagi, pemerintah memutuskan untuk tidak menunjuk karteker yang akan menjalankan fungsi direksi, dan malah menugaskan dewan komisaris untuk menjalankan fungsi direksi. "Saya menduga ada agenda yang mencurigakan di balik pengosongan kursi direksi tersebut," kata Jasso.

Sebelumnya, Deputy Menteri BUMN Bidang Pertambangan Industri Strategis dan Telekomunikasi Roes Aryawijaya menegaskan pemerintah tidak akan menunjuk karteker untuk menggantikan Direktur Utama PT BA Ismet Harmaini yang telah berakhir masa jabatannya. Sebelumnya, Ismet Harmaini beserta empat direksi PT BA diberhentikan dari jabatannya dalam RUPSLB yang digelar Rabu (15/11) lalu. Dengan demikian, kata Roes, pelaksana harian direksi PT BA akan dipegang Dewan Komisaris PT Bukit Asam. (AN/Uud/E-1)



HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> INVESTOR DAILY <input checked="" type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA <input type="radio"/> SUARA KARYA	<input type="radio"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> TABLOID KONTAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH TRUST <input type="radio"/>																													
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input checked="" type="checkbox"/> SUMUM																												
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
HALAMAN : 15											TAHUN 2006																			

# Kritis, Tol Masih Ditutup

Didik J Rachbini: Jelaskan Pengalihan Saham secara Transparan

SIDOARJO, KOMPAS – Jalan tol ruas Porong-Gempol di Kabupaten Sidoarjo masih kritis. Lumpur di dalam kolam penampungan di sisi selatan jalan tol masih berpotensi meluber dan menjebol tanggul. Karena itu, jalan tol yang menjadi akses utama Surabaya-Malang itu sampai Minggu (19/11) masih ditutup total.

Jalan tol ruas Porong-Gempol ditutup sejak Sabtu lalu pukul 03.45. Penutupan terpaksa dilakukan karena tanggul di sekitar semburan lumpur panas atau tanggul ring 1 jebol. Akibatnya, lumpur mengalir ke kolam penampungan di sisi selatan dan meluber ke jalan tol sepanjang 100 meter.

Dari pemantauan hari Minggu pukul 11.00-13.00, luberan lumpur sudah dibersihkan dari badan jalan. Namun, tanggul yang jebol di ring 1 masih menganga selebar sekitar 10 meter. Akibatnya, lumpur panas terus mengalir deras ke kolam penampungan di sisi selatan jalan tol.

Kondisi ini menyebabkan per-

mukaan lumpur dalam kolam penampungan hampir mencapai bibir tanggul. Rata-rata permukaan lumpur hanya terpaut 30 sentimeter hingga 40 sentimeter dari bibir tanggul, mulai dari Kilometer 38,400 hingga Kilometer 39,400.

Sampai kemarin belum terlihat upaya peninggian tanggul di sisi jalan tol tersebut. Pompa penyedot lumpur di ujung timur tanggul jalan tol pun tak beroperasi.

Menurut sejumlah operator, pompa penyedot lumpur berhenti Minggu sekitar pukul 01.00. Salah satu bagian pompa rusak akibat lumpur terlalu panas.

Kepala Cabang Tol Surabaya-Gempol Subakti Syukur me-

nyatakan, kondisi badan jalan sudah layak dilewati kembali. Namun, tanggul masih rawan sehingga jalan tol tetap ditutup. "Kami akan membuka tol setelah ada instruksi dari Tim Nasional," ujar Syukur.

Juru bicara Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur di Sidoarjo Rudy Novrianto menyatakan, upaya peninggian tanggul di sisi jalan tol dan penutupan lubang tanggul di ring 1 terus dikerjakan. "Kami mengusahakan pengerjaan bisa segera diselesaikan," katanya.

Menurut Rudy, Senin ini Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur di Sidoarjo akan memberikan laporan kepada Komisi VII DPR di Jakarta.

Pompa air dan lumpur di kanal pembuang di Desa Pejarakan hari Minggu juga sempat dihentikan sekitar satu jam. Menurut operator pompa, Yudi (30), akibat suhu lumpur mencapai 50 derajat Celsius hingga 70 derajat Celsius, mesin perlu diistirahatkan sejenak agar tidak rusak.

## Penjelasan kepada publik

Ketua Komisi VI DPR Didik J Rachbini mengatakan, masyarakat perlu mendapatkan penjelasan tentang pengalihan saham Lapindo Brantas Inc secara transparan, terutama mereka yang menjadi korban lumpur panas di Sidoarjo. Itu terkait dengan tanggung jawab penyelesaian kerugian akibat bencana lumpur panas tersebut.

"Pemerintah, Lapindo, dan berbagai pihak telah melakukan langkah mengatasi masalah semburan lumpur panas secara relatif memadai," kata Didik kepada wartawan di Jember, Minggu.

Didik mengakui, sejauh ini DPR belum membahas secara khusus masalah penjualan saham Lapindo Brantas dan tanggung jawab Lapindo Brantas kepada masyarakat yang terkena bencana. Namun, setidaknya Wakil Presiden M Jusuf Kalla dan pejabat negara lainnya sudah meminta agar tanggung jawab tetap ada pada Lapindo Brantas.

(LAS/SIR)

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> INVESTOR DAILY <input type="radio"/> KOMPAS <input checked="" type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA <input type="radio"/> SUARA KARYA	<input type="radio"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> TABLOID KONTAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH TRUST <input type="radio"/>																													
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input checked="" type="checkbox"/> UMUM																												
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
HALAMAN : 119											TAHUN 2006																			

# Greenpeace: Pemerintah Kaburkan Penanggung Jawab Lapindo

Grup Bakrie memerintah Minarak meminjamkan uang ke Freehold.

JAKARTA — Greenpeace, lembaga internasional pelestari lingkungan, menilai pemerintah Indonesia telah memberikan ketidakjelasan kepada masyarakat mengenai penanggung jawab insiden dan ganti rugi dari luapan lumpur panas sumur Lapindo Brantas Inc. di Porong, Sidoarjo.

Sikap pemerintah itu, kata Direktur Eksekutif Greenpeace Wilayah Asia Tenggara Emmy Hafidz, menyebabkan permasalahan menjadi berlarut-larut. "Ini membuat ada pihak yang le-

pas tanggung jawab," kata Emmy saat dihubungi pekan lalu di Bangkok.

Ketidaktegasan pemerintah, Emmy melanjutkan, akibat duduknya Aburizal Bakrie—pendiri Grup Bakrie—sebagai Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat. Sementara itu, Lapindo Brantas merupakan anak perusahaan PT Energi Mega Persada Tbk., yang terafiliasi dengan Grup Bakrie. "Jelas ini ada konflik kepentingan," ujar dia.

Menurut Emmy, pihak yang bertanggung jawab itu dapat ditunjuk dengan jelas. "Sebagai operator, Lapindo telah membuat kesalahan pengeboran yang mengakibatkan semburan lumpur panas," tuturnya.

Badan Pengawas Pasar

Modal juga dituntut bertindak lebih tegas kepada Energi Mega Persada yang masih menutupi informasi penjualan Lapindo Brantas. Hingga kini, Energi Mega Persada belum menjelaskan profil pembeli—Freehold Group Limited—dan nilai transaksi penjualan dengan alasan perjanjian penjualan bersifat rahasia.

"Bapepam harus tegas memberikan sanksi karena ini melanggar keterbukaan informasi pasar modal," kata pengamat pasar modal Edwin Sinaga kemarin. Dia menyebutkan sanksi yang tepat adalah *delisting* atau penghapusan pencatatan di bursa bila Energi Mega Persada tetap menolak memberikan informasi.

Edwin melanjutkan,

Energi Mega Persada perlu transparan karena beberapa alasan. Pertama, menjual Lapindo berarti mengurangi nilai aset perusahaan. "Ini dapat disebut transaksi material karena mempengaruhi ekuitas perusahaan," katanya.

Alasan kedua, tutur Edwin, penjualan Lapindo meninggalkan masalah lumpur yang belum jelas penyelesaian ganti ruginya.

Menurut Direktur Minarak Labuan Co. Ltd. Jay Abdullah Alatas, Lapindo tetap berkomitmen menanggulangi lumpur. Untuk membiayai penanggulangan itu, kata dia kepada koran ini, "Grup Bakrie telah memerintah Minarak memberikan pinjaman duit kepada Freehold."

Minarak adalah unit usaha yang bergerak dalam bidang manajemen investasi. Dari penelusuran di Internet, terinformasi bahwa sebesar 66 persen saham Minarak dimiliki Bakrie Interinvestindo. Minarak juga memiliki saham di PT Bumi Resources Tbk. sebesar 14,87 persen.

Edwin mempertanyakan rencana pinjaman Grup Bakrie itu. "Sampai sejauh mana pertanggungjawaban pinjaman dan pengembaliannya mempengaruhi induk perusahaan," ujar dia. "Itu juga harus diketahui."

Hingga kini identitas dan profil Freehold masih belum jelas. Otoritas bursa memberi Energi batas waktu tiga hari untuk menjelaskannya.

● YULIAWATI | M FASABENI | BUDI RIZA

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA  
 INVESTOR DAILY  
 KOMPAS  
 KORAN TEMPO  
 MEDIA INDONESIA  
 PIKIRAN RAKYAT  
 RAKYAT MERDEKA  
 REPUBLIKA  
 SUARA KARYA

SEPUTAR INDONESIA  
 SUARA PEMBARUAN  
 SINAR HARAPAN  
 TABLOID KONTAN  
 THE JAKARTA POST  
 MAJALAH GATRA  
 MAJALAH TEMPO  
 MAJALAH TRUST

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 SUMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 3

TAHUN 2006

BUNTUT PENJUALAN LAPINDO BRANTAS INC

## Warga Resah, Minta Realisasi Ganti Rugi

**PENJUALAN** Lapindo Brantas Inc dari Grup Bakrie ke Freehold Group Limited memancing reaksi. Warga korban lumpur menuntut disiapkan cadangan dana khusus (deposit). Langkah itu dilakukan karena mereka khawatir pergantian pemilik itu merupakan upaya Lapindo untuk melepaskan diri dari tanggung jawabnya membayar ganti rugi.

"Harus ada deposit untuk menjamin pembayaran ganti rugi tetap jalan," ungkap Sekretaris Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Jatirejo Khoirul Huda kemarin. Menurut dia, dana tersebut menjadi jaminan ganti rugi warga tetap terbayar.

Prinsipnya, lanjut Huda, saat ini warga korban lumpur resah atas penjualan tersebut. "Mereka khawatir itu adalah upaya melepaskan diri dari tanggung jawab," kata Huda, mengungkapkan pemahaman sebagian besar warga Jatirejo atas penjualan Lapindo oleh Grup Bakrie.

Karena itu, menurut dia, dalam waktu dekat, warga Jati-

rejo akan meminta kejelasan realisasi ganti rugi rumah dan tanah mereka yang sudah terendam kepada Timnas Penanggulangan Bencana Lumpur. Huda menyebut bahwa warga telah sepakat memberikan deadline pembayaran ganti rugi Maret 2007.

Sebagaimana diberitakan, Freehold Group membeli 100 persen saham Lapindo yang dimiliki Kalila Energi dan Pan Asia Enterprise Ltd. Kedua perusahaan itu sebelumnya membeli saham Lapindo dari PT Energi Mega Persada (EMP), perusahaan Grup Bakrie yang menguasai 50 persen Lapindo Brantas Inc.

Bukan hanya warga Jatirejo yang merasa resah, masyarakat di desa yang berstatus masih terancam pun merasakan keresahan yang sama. "Sekarang saja sudah tidak jelas, apalagi kalau pemiliknya ganti," ungkap Ahmad Rofi'i Mashudi.

Menurut tokoh masyarakat Mindi yang akrab dipanggil Gus Rofik itu, para korban khawatir perubahan status kepemilikan Lapindo akan

membuat kesepakatan tentang ganti rugi yang sudah dicapai mentah lagi. "Ini tentu tidak baik karena biaya sosialnya akan cukup tinggi," katanya.

Menanggapi keresahan warga tersebut, Ketua Timnas Penanggulangan Lumpur Sidoarjo Basuki Hadimulyono hanya berjanji segera mempertemukan warga dengan Lapindo untuk mengklarifikasi kelanjutan proses ganti untung setelah penjualan Lapindo.

"Saya sudah minta pada Lapindo untuk sosialisasi," ungkapnya. Basuki menambahkan, sasaran sosialisasi itu adalah warga korban bencana dan 20 perusahaan korban lumpur, termasuk 12 kontraktor yang kini bekerja di lokasi.

Namun, soal jaminan berupa deposit di bank agar Lapindo tak lepas tanggung jawab seperti tuntutan warga, Basuki menolak berkomentar. "Kami sudah usulkan strategi yang lain. Tapi, soal ganti rugi tetap ada di Lapindo. ■ JPNN